



KECAMATAN SOMAGEDE
KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) OPERASIONAL TAHUN 2026

Somagede Cemekel

Somagede Semanger



Kata Pengantar

Puji Syukur kita Panjatkan kehadiran Alloh SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Somagede Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan Goodgovernance sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Mengingat pentingnya system pengendalian intern, sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPIP ini, dokumen penilaian risiko yang kita susun ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini, dengan harapan ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Somagede, 31 Desember 2025

Camat Somagede

Misnuraini, S.STP
Pembina Tingkat I

NIP. 197806051997032003

Daftar Isi

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Dasar Hukum..... 4

 C. Maksud dan Tujuan 5

 D. Ruang Lingkup..... 5

BAB II Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian 11

 A. Penetapan Konteks/Tujuan 11

 B. Hasil Identifikasi Risiko 12

 C. Hasil Analisis Risiko 13

 D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan 14

 E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan 16

BAB III Rancangan Informasi dan Komunikasi 18

BAB IV Rancangan Pemantauan..... 19

BAB V Penutup..... 20

Lampiran 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan, penyelenggaraan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Tujuan Pembangunan daerah yang menjadi ampunan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas seperti yang tertuang dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Rencana Tindak Pengendalian ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No, 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
- 9) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di pada Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan pengendalian, potensi risiko, serta kebutuhan langkah pengendalian secara terstruktur.

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat dan memastikan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi secara efektif, akuntabel, dan berintegritas.

D. Ruang Lingkup

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini Fokus pada identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko operasional Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) melibatkan seluruh jajaran

pimpinan/tingkatan manajemen dan pegawai di lingkungan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Rencana Kinerja Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan
4. Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2026 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		1	Pengadaan Mebel
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		

	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
	2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	2	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
	3	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB II
Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuas Tahun 2025 – 2045. Perumusan tujuan dan sasaran dianalisis dan disusun berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2025 – 2029.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah perlu Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang seterusnya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah kemudian diterjemahkan dalam program kegiatan sebagai pendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan penetapan konteks Operasional Kecamatan Somagede yang sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Tujuan	Kegiatan	Indikator
Konteks Operasional	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan Target : 100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Target : 100%

	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum Target : 100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa Target : 100%
	Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan Lembaga Tingkat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat Target : 100 %
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan Target : 6 Laporan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan Target : 100%

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran :

Form 2C : Penetapan Konteks Risiko Operasional Kecamatan Somagede

B. Hasil Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
A.	Risiko Operasional
1	Sinergitas dan koordinasi antar instansi terhadap penyusunan rencana program kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan belum terbangun secara optimal
2	Terdapat penyalahgunaan uang PBB
3	Belum terlayannya pelayanan untuk disabilitas/kelompok rentan dan Fasilitas umum lainnya
4	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa
5	Adanya Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran
6	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah
7	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum
8	Sering terjadinya bencana alam
9	Adanya penyimpangan pengelolaan APBDes

Rincian indentifikasi risiko dapat dilihat pada lampiran:

Form 3.c : Indetifikasi Risiko Operasional Kecamatan Somagede

C. Hasil Analisis Risiko

Hasil dari identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Form 4.

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi. Terhadap risiko dengan nilai rendah namun berdampak sangat besar juga akan dilakukan pengendalian, sehingga masuk sebagai risiko prioritas. Berikut adalah daftar risiko prioritas dan hasil analisis risiko Kecamatan Somagede.

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko
1	Sinergitas dan koordinasi antar instansi terhadap penyusunan rencana program kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan belum terbangun secara optimal	12

2	Terdapat penyalahgunaan uang PBB	5
3	Belum terlayannya pelayanan untuk disabilitas/keompok rentan dan Fasilitas umum lainnya	12
4	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	12
5	Adanya Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran	12
6	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	12
7	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12
8	Sering terjadinya bencana alam	15
9	Adanya penyimpangan pengelolaan APBDes	5

Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran:

Form 5 : Risiko Prioritas Operasional Kecamatan Somagede

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dan risiko yang muncul (mitigative), atau keduanya.

D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya yang ditunjukkan pada lampiran Form 6 dan Form 7. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku dan jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Berikut adalah daftar pengendalian yang sudah ada pada Kecamatan Somagede.

No	Risiko Prioritas	Pengendalian yang Sudah ada	E/KE/TE
1	Sinergitas dan koordinasi antar instansi terhadap penyusunan rencana program kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan belum terbangun secara optimal	Mengintensifkan koordinasi antar instansi penyelenggaraan pemerintahan serta menyusun rencana program kegiatan	KE
2	Terdapat penyalahgunaan uang PBB	Diadakan Evaluasi dan Monitoring secara intensif dalam pengelolaan PBB	KE
3	Belum terlayannya pelayanan untuk disabilitas/keompok rentan dan Fasilitas umum lainnya	Mengoptimalkan dan mengintensifkan sarana prasana yang sudah ada	KE
4	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	Mengintesifkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	KE
5	Adanya Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran	Mengadakan Musdes DTKS atau Verval yang lain	E
6	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	Melakukan kemitraan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	KE
7	Adanya kasus gangguan	Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	KE

	ketentraman dan ketertiban umum		
8	Sering terjadinya bencana alam	Evaluasi atas terjadinya bencana alam yang terjadi di wilayah Kecamatan	KE
9	Adanya penyimpangan pengelolaan APBDes	Mengintensifkan pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan APBDes	KE

Rincian Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan dapat dilihat pada lampiran:

Form 7 : Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1. Menghindari risiko (*Avoid*)
2. Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (*Abate*)
3. Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (*Mitigate*)
4. Membagi risiko (*Share*)
5. Menerima/mempertahankan risiko (*Accept/Retain*)

Berikut adalah daftar pengendalian yang masih dibutuhkan pada Kecamatan Somagede.

No	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian
1	Sinergitas dan koordinasi antar instansi terhadap penyusunan rencana program kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan belum terbangun secara optimal	Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal antar instansi penyelenggaraan pemerintahan

2	Terdapat penyalahgunaan uang PBB	Monev yang terjadwal dalam pengelolaan PBB
3	Belum terlayannya pelayanan untuk disabilitas/keompok rentan dan Fasilitas umum lainnya	Mengupayakan pengadaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan untuk disabilitas/keompok rentan dan fasilitas umum lainnya
4	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	Monev terkait kegiatan pemberdayaan Desa
5	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	Mengintensifkan Koordinasi kemitraan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah
6	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal dalam penyelenggaraan trantibum
7	Sering terjadinya bencana alam	Koordinasi dengan Masyarakat dan Instansi lain terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
8	Adanya penyimpangan pengelolaan APBDes	Monev pengelolaan APBDes

Rincian Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan dapat dilihat pada lampiran:

Form 7 : Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

BAB III

Rancangan Informasi dan Komunikasi

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Publikasi terhadap Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada situs/laman resmi Kecamatan Somagede
2. Mengadakan sosialisasi/workshop/diseminasi terkait dengan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I *Form 8*.

BAB IV

Rancangan Pemantauan

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran *Form 9*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran *Form 10*.

BAB V

Penutup

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen RTP ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Somagede, 31 Desember 2025



Camat Somagede

Mismuraini, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 197806051997032003

Lampiran

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL	
KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS	
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Tahun 2026
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Somagede
Sumber Data	Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede Tahun 2026
Tujuan Strategis	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas
Program dan Kegiatan Utama yang terkait dengan tujuan strategis	Program:
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Kegiatan:
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program:
	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Kegiatan:
	2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	2.3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
	2.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	Program:
	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Kegiatan:
	3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	Program:
	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan:	
4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

	4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
	Program:			
	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	Kegiatan:			
	5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	Program:			
	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	Kegiatan:			
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Keluaran/Hasil Indikator Kegiatan	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Dokumen	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan		100%	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum		100%	
	Persentase Pengadaan Barang		100%	
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan		100%	
	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi barang milik daerah		100%	
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan		100%	
	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan		100%	
	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum		100%	
	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		100%	
	Persentase pemberdayaan masyarakat desa		100%	
	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat		100%	
	umlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan		6 Laporan	
	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		100%	
	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan		8 Laporan	
	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan		100%	
	Informasi Lain	-		
	Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan	Indikator	Target 2026
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100%	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	6 Laporan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%
Somagede, 31 Desember 2025 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas  M. S. Burani, S.STP NIP. 197806051997032003			

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD									
Nama OPD		: Kecamatan Somagede							
Tahun Penilaian		: 2025							
Periode yang dinilai		: Tahun 2026							
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas							
Sasaran Strategis OPD		: 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah 2. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan							
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan							
No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi barang milik daerah							
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan							

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Sinergitas dan koordinasi antar instansi terhadap penyusunan rencana program kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan belum terbangun secara optimal	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Kurangnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan 2. Kurangnya pemahaman SDM terkait Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Internal	C	1. Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tidak tercapai 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan 3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan.	1. Kecamatan 2. Masyarakat
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	Terdapat penyalahgunaan uang PBB	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	1. Kurangnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa 2. Kurangnya pemahaman SDM terkait Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa	Internal	C	1. Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tidak tercapai 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan 3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan.	1. Kecamatan 2. Masyarakat

	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Belum terlayannya pelayanan untuk disabilitas/kelembagaan rentan dan Fasilitas umum lainnya	Kepala Seksi Pelayanan	Belum Tersedianya Anggaran untuk pemeliharaan Sarana Prasarana Umum (Disabilitas/Kelompok Rentan) dan Fasilitas umum lainnya	Internal	C	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas umum yang tersedia	1. Kecamatan 2. Masyarakat
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat							
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan							
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	Belum optimalnya pembinaan kepada desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Internal	C	Kurang optimalnya kegiatan yang melibatkan peran masyarakat desa	1. Kecamatan 2. Masyarakat

		Persentase pemberdayaan masyarakat desa	Adanya Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	Data yang digunakan belum terupdate sesuai kondisi terbaru	Internal	C	Adanya Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya	1. Kecamatan 2. Masyarakat
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Kurangnya pembinaan dan fasilitasi kepada lembaga kemasayarakatan	Internal	C	Belum bersinergi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1. Kecamatan 2. Masyarakat
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum							1. Kecamatan 2. Masyarakat

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Adanya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Kurang upayanya dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan gangguan trantibum 2. Kurangnya koordinasi dan kurang optimalnya sosialisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Internasional	C	Adanya rasa kurangya dan aman dalam masyarakat	1. Kecamatan 2. Masyarakat
		Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Sering terjadinya bencana alam	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kondisi wilayah yang rawan bencana	Internasional	C	Adanya kerusakan pemukiman, lahan, akses jalan dan bahkan korban jiwa	1. Kecamatan 2. Masyarakat
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah							
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan							

		Umum yang Ditugaskan							
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	Adanya penyimpangan pengelolaan APBDes	1. Kepala Seksi Pemerintahan Desa 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Kurangnya Pemahaman SDM terkait aturan pengelolaan APBdes yang berubah - ubah	Internal	C	1. Terjadinya Penyimpangan pengelolaan APBdes 2. Adanya kasus hukum berkaitan dengan pengelolaan APBdes	

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO OPERASIONAL				
Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Somagede		
Tahun Penilaian		: 2025		
Periode Penilaian		: Tahun 2026		
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas		
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan		
No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Operasional Perangkat Daerah			
1	Sinergitas dan koordinasi antar instansi terhadap penyusunan rencana program kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan belum terbangun secara optimal	4,00	3,00	12,00
2	Terdapat penyalahgunaan uang PBB	5,00	1,00	5,00
3	Belum terlayannya pelayanan untuk disabilitas/kelompok rentan dan Fasilitas umum lainnya	4,00	3,00	12,00
4	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	4,00	3,00	12,00
5	Adanya Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran	4,00	3,00	12,00
6	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	4,00	3,00	12,00
7	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	4,00	3,00	12,00
8	Sering terjadinya bencana alam	5,00	3,00	15,00
9	Adanya penyimpangan pengelolaan APBDes	5,00	1,00	5,00

FORMULIR KERTAS KERJA					
DAFTAR RISIKO OPERASIONAL PRIORITAS					
Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Somagede			
Tahun Penilaian		: 2025			
Periode Penilaian		: Tahun 2026			
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas			
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan			
No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO OPERASIONAL OPD				
1	Sinergitas dan koordinasi antar instansi terhadap penyusunan rencana program kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan belum terbangun secara optimal	12	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Kurangnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan 2. Kurangnya pemahaman SDM terkait Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tidak tercapai 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan 3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan.
2	Terdapat penyalahgunaan uang PBB	5	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	1. Kurangnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa 2. Kurangnya pemahaman SDM terkait Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa	1. Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tidak tercapai 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan 3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan.

3	Belum terlayannya pelayanan untuk disabilitas/kelompok rentan dan Fasilitas umum lainnya	12	Kepala Seksi Pelayanan	Belum Tersedianya Anggaran untuk pemeliharaan Sarana Prasarana Umum (Disabilitas/Kelompok Rentan) dan Fasilitas umum lainnya	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas umum yang tersedia
4	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	12	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	Belum optimalnya pembinaan kepada desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kurang optimalnya kegiatan kegiatan yang melibatkan peran masyarakat desa
5	Adanya Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran	12	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	Data yang dipergunakan belum terupdate sesuai dengan kondisi terbaru	Adanya Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya
6	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	12	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Kurangnya pembinaan dan fasilitasi kepada lembaga kemasyarakatan	Belum bersinergi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
7	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12	Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum	1. Kurang upayanya dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan gangguan trantibum 2. Kurangnya koordinasi dan kurang optimalnya sosialisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Adanya rasa kurangnya dan aman dalam masyarakat

8	Sering terjadinya bencana alam	15	Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum	Kondisi wilayah yang rawan bencana	Adanya kerusakan pemukiman, lahan, akses jalan dan bahkan korban jiwa
9	Adanya penyimpangan pengelolaan APBDes	5	1. Kepala Seksi Pemerintahan Desa 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Kurangnya Pemahaman SDM terkait aturan pengelolaan APBdes yang berubah - ubah	1. Terjadinya Penyimpangan pengelolaan APBdes 2. Adanya kasus hukum berkaitan dengan pengelolaan APBdes

Formulir Kertas Kerja							
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko							
Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Somagede					
Tahun Penilaian		: 2025					
Periode Penilaian		: Tahun 2026					
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO OPERASIONAL OPD						
1	Sinergitas dan koordinasi antar instansi terhadap penyusunan rencana program kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan belum terbangun secara optimal	Mengintensifkan koordinasi antar instansi penyelenggaraan pemerintahan serta menyusun rencana program kegiatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal antar instansi penyelenggaraan pemerintahan	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2026
2	Terdapat penyalahgunaan uang PBB	Diadakan Evaluasi dan Monitoring secara intensif dalam pengelolaan PBB	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev yang terjadwal dalam pengelolaan PBB	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	Triwulan II dan III Tahun 2026

3	Belum terlayannya pelayanan untuk disabilitas/keompok rentan dan Fasilitas umum lainnya	Mengoptimalkan dan mengintensifkan sarana prasana yang sudah ada	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengupayakan pengadaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan untuk disabilitas/keompok rentan dan fasilitas umum lainnya	Kepala Seksi Pelayanan	Triwulan IV Tahun 2026
4	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	Mengintensifkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev terkait kegiatan pemberdayaan Desa	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	Triwulan II dan IV Tahun 2026
5	Adanya Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran	Mengadakan Musdes DTKS atau Verval yang lain	E	-	-	-	-
6	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	Melakukan kemitraan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengintensifkan Koordinasi kemitraan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Triwulan I dan III Tahun 2026

7	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal dalam penyelenggaraan trantibum	Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum	Triwulan IV Tahun 2026
8	Sering terjadinya bencana alam	Evaluasi atas terjadinya bencana alam yang terjadi di wilayah Kecamatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Koordinasi dengan Masyarakat dan Instansi lain terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana alam	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Triwulan IV Tahun 2026
9	Adanya penyimpangan pengelolaan APBDes	Mengintensifkan pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan APBDes	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev pengelolaan APBDes	1. Kepala Seksi Pemerintahan Desa 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2026

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN							
Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Somagede					
Tahun Penilaian		: 2025					
Periode Penilaian		: Tahun 2026					
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal antar instansi penyelenggaraan pemerintahan	Publikasi RTP 2026 dan Rapat Sosialisasi RTP Tahun 2026	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seluruh Karyawan di Kecamatan Somagede, Seluruh Instansi di Kecamatan Somagede dan Masyarakat	Semester 1 Tahun 2026		

2	Monev yang terjadwal dalam pengelolaan PBB	Publikasi RTP 2026 dan Rapat Sosialisasi RTP Tahun 2026	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	Seluruh Karyawan di Kecamatan Somagede, Seluruh Instansi di Kecamatan Somagede dan Masyarakat	Semester 1 Tahun 2026		
3	Mengupayakan pengadaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan untuk disabilitas/keompok rentan dan fasilitas umum lainnya	Publikasi RTP 2026 dan Rapat Sosialisasi RTP Tahun 2026	Kepala Seksi Pelayanan	Seluruh Karyawan di Kecamatan Somagede, Seluruh Instansi di Kecamatan Somagede dan Masyarakat	Semester 1 Tahun 2026		
4	Monev terkait kegiatan pemberdayaan Desa	Publikasi RTP 2026 dan Rapat Sosialisasi RTP Tahun 2026	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	Seluruh Karyawan di Kecamatan Somagede, Seluruh Instansi di Kecamatan Somagede dan Masyarakat	Semester 1 Tahun 2026		

5	Mengintensifkan Koordinasi kemitraan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	Publikasi RTP 2026 dan Rapat Sosialisasi RTP Tahun 2026	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Seluruh Karyawan di Kecamatan Somagede, Seluruh Instansi di Kecamatan Somagede dan Masyarakat	Semester 1 Tahun 2026		
6	Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal dalam penyelenggaraan trantibum	Publikasi RTP 2026 dan Rapat Sosialisasi RTP Tahun 2026	Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum	Seluruh Karyawan di Kecamatan Somagede, Seluruh Instansi di Kecamatan Somagede dan Masyarakat	Semester 1 Tahun 2026		
7	Koordinasi dengan Masyarakat dan Instansi lain terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana alam	Publikasi RTP 2026 dan Rapat Sosialisasi RTP Tahun 2026	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seluruh Karyawan di Kecamatan Somagede, Seluruh Instansi di Kecamatan Somagede dan Masyarakat	Semester 1 Tahun 2026		

8	Monev pengelolaan APBDes	Publikasi RTP 2026 dan Rapat Sosialisasi RTP Tahun 2026	1. Kepala Seksi Pemerintahan Desa 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Seluruh Karyawan di Kecamatan Somagede, Seluruh Instansi di Kecamatan Somagede dan Masyarakat	Semester 1 Tahun 2026		
---	--------------------------	---	--	---	-----------------------	--	--

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Somagede					
Tahun Penilaian	: 2025					
Periode Penilaian	: Tahun 2026					
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas					
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan					
N o	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keteranga n
a	b	c	d	e	f	g
1	Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal antar instansi penyelenggaraan pemerintahan	Sosialisasi/Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi	Camat Somagede	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2026		
2	Monev yang terjadwal dalam pengelolaan PBB	Sosialisasi/Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi	Camat Somagede	Triwulan II dan III Tahun 2026		
3	Mengupayakan pengadaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan untuk disabilitas/keompok rentan dan fasilitas umum lainnya	Sosialisasi/Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi	Camat Somagede	Triwulan IV Tahun 2026		
4	Monev terkait kegiatan pemberdayaan Desa	Sosialisasi/Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi	Camat Somagede	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
5	Mengintensifkan Koordinasi kemitraan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	Sosialisasi/Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi	Camat Somagede	Triwulan I dan III Tahun 2026		

6	Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal dalam penyelenggaraan trantibum	Sosialisasi/Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi	Camat Somagede	Triwulan IV Tahun 2026		
7	Koordinasi dengan Masyarakat dan Instansi lain terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana alam	Sosialisasi/Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi	Camat Somagede	Triwulan IV Tahun 2026		
8	Monev pengelolaan APBDes	Sosialisasi/Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi	Camat Somagede	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP OPERASIONAL									
Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Somagede							
Tahun Penilaian		: 2025							
Periode Penilaian		: Tahun 2026							
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas							
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan							
No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
a	b	Tanggal terjadi	Sebab	Dampak	f	g	h	i	j
I	Risiko Operasional OPD								
1	Sinergitas dan koordinasi antar instansi terhadap penyusunan rencana program kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan belum terbangun secara optimal					Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal antar instansi penyelenggaraan pemerintahan	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2026		
2	Terdapat penyalahgunaan uang PBB					Monev yang terjadwal dalam pengelolaan PBB	Triwulan II dan III Tahun 2026		

3	Belum terlayannya pelayanan untuk disabilitas/keompok rentan dan Fasilitas umum lainnya					Mengupayakan pengadaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan untuk disabilitas/keompok rentan dan fasilitas umum lainnya	Triwulan IV Tahun 2026		
4	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa					Monev terkait kegiatan pemberdayaan Desa	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
5	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah					Mengintensifkan Koordinasi kemitraan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	Triwulan I dan III Tahun 2026		
6	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum					Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal dalam penyelenggaraan trantibum	Triwulan IV Tahun 2026		
7	Sering terjadinya bencana alam					Koordinasi dengan Masyarakat dan Instansi lain terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana alam	Triwulan IV Tahun 2026		
8	Adanya penyimpangan pengelolaan APBDes					Monev pengelolaan APBDes	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025		